

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Konservasi Pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu

Analysis of Accountability of Conservation Fund Management at the Lore Lindu National Park Office, Napu Region

Kristina Winni Sondok^{1*}, Diarespati², Chaeranti M. Dewi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido

***Corresponding Author: E-mail: winnikristina@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana konservasi pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) Wilayah Napu. Fokus penelitian meliputi: (1) bentuk dan mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana konservasi, (2) penerapan prinsip transparansi, responsibilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, (3) faktor pendukung dan penghambat terwujudnya akuntabilitas, serta (4) rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala balai, bendahara, dan staf keuangan), observasi partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban dana konservasi. Analisis data dilakukan secara interpretatif untuk memahami mekanisme dan praktik akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan publik di sektor konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana konservasi di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu telah disusun dan dioperasikan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berlaku secara nasional, baik dari sisi sumber pendanaan maupun siklus pengelolaannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Konservasi, Taman Nasional Lore Lindu, Transparansi, Tata Kelola Keuangan Publik

ABSTRACT

This research aims to analyze the accountability of conservation fund management at the Lore Lindu National Park Office (BBTNLL) Napu Region. The focus of the research includes: (1) forms and mechanisms of accountability for conservation fund management, (2) application of the principles of transparency, responsibility, and compliance with regulations, (3) supporting and inhibiting factors for the realization of accountability, and (4) recommendations for improvements to increase accountability for conservation fund management. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants (head of the office, treasurer, and financial staff), participant observation, and documentation studies of financial reports and conservation fund accountability documents. Data analysis was conducted interpretively to understand accountability mechanisms and practices in the context of public financial management in the conservation sector. The results of the study indicate that the management of conservation funds at the Lore Lindu National Park Office in the Napu Region has

been structured and operationalized within the nationally applicable state financial management framework, both in terms of funding sources and management cycles.

Keywords: *Accountability, Conservation Fund, Lore Lindu National Park, Transparency, Public Financial Governance*

PENDAHULUAN

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) Wilayah Napu merupakan salah satu unit pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki karakteristik sosial dan ekologis yang kompleks. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam menjalankan fungsi konservasi, BBTNLL Wilayah Napu mengelola berbagai program perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh dana konservasi dari berbagai sumber, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program kemitraan konservasi, maupun dukungan dari lembaga mitra dan donor. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang akuntabel agar setiap penggunaan anggaran benar-benar mendukung tujuan konservasi secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana konservasi di Wilayah Napu menghadapi tantangan tersendiri karena melibatkan berbagai faktor dan mekanisme pendanaan yang berbeda-beda. Setiap sumber dana memiliki ketentuan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tidak selalu seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam proses akuntabilitas. Dalam praktiknya, pengelolaan dana tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek administratif dan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban substantif, yaitu sejauh mana dana yang digunakan benar-benar efektif dalam mendukung kegiatan konservasi dan menjawab permasalahan di lapangan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya kesenjangan antara akuntabilitas administratif dengan akuntabilitas substantif dalam pengelolaan dana konservasi.

Berdasarkan observasi awal dan penelusuran dokumen pendahuluan yang dilakukan peneliti di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu, diperoleh indikasi bahwa pengelolaan dana konservasi masih menghadapi sejumlah permasalahan pada aspek akuntabilitas. Observasi awal menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku, namun belum sepenuhnya disertai dengan dokumentasi yang menggambarkan keterkaitan langsung antara penggunaan dana dengan capaian program konservasi di lapangan. Selain itu, informasi mengenai alokasi dan realisasi dana konservasi belum seluruhnya tersosialisasi secara terbuka kepada pihak-pihak terkait di tingkat wilayah, sehingga pemahaman mengenai penggunaan dana masih terbatas pada lingkup internal pengelola.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara akuntabilitas formal-administratif dengan akuntabilitas substantif dalam pengelolaan dana konservasi di BBTNLL Wilayah Napu. Meskipun secara administratif pengelolaan dana telah memenuhi prosedur formal seperti pelaporan dan pencatatan keuangan, namun efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan konservasi, ketepatan sasaran program, serta transparansi kepada pemangku kepentingan masih perlu dikaji secara mendalam. Kompleksitas sumber pendanaan yang beragam (APBN, dana mitra, program kemitraan) dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda-beda semakin memperumit pencapaian akuntabilitas yang komprehensif. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan dana, menurunnya kepercayaan publik, serta tidak optimalnya capaian program konservasi di lapangan.

Kompleksitas pengelolaan dana konservasi di BBTNLL Wilayah Napu semakin meningkat seiring dengan tingginya tekanan sosial dan ekologis di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Interaksi intensif antara kawasan konservasi dengan aktivitas masyarakat, konflik kepentingan terkait pemanfaatan lahan, serta ancaman terhadap kelestarian hutan seperti perambahan dan aktivitas ilegal menuntut alokasi dana konservasi yang tidak hanya memadai dari sisi jumlah, tetapi juga tepat sasaran dan dikelola secara transparan. Apabila dana konservasi tidak dikelola secara akuntabel, maka risiko inefisiensi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola kawasan akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan konservasi itu sendiri.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana konservasi menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan keterbatasan pendanaan konservasi secara nasional. Berbagai kajian menunjukkan

adanya kesenjangan antara kebutuhan pendanaan konservasi dengan alokasi anggaran yang tersedia, khususnya pada sektor kehutanan dan kawasan konservasi. Kondisi keterbatasan anggaran tersebut menuntut pengelola kawasan konservasi, termasuk BBTNLL Wilayah Napu, untuk mengelola dana yang tersedia secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam situasi di mana dana konservasi relatif terbatas, akuntabilitas menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi perlindungan kawasan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Meskipun pengelolaan dana konservasi pada sektor kehutanan dan kawasan konservasi secara normatif telah diatur melalui berbagai regulasi, pedoman teknis, serta sistem pelaporan keuangan yang baku, dalam praktik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih berpotensi terjadi kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif. Akuntabilitas sering kali dipahami sebatas pemenuhan kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap prosedur formal, sementara aspek efektivitas penggunaan dana, ketepatan sasaran program, serta kontribusi nyata terhadap tujuan konservasi belum sepenuhnya terukur secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana konservasi benar-benar diwujudkan dalam praktik operasional di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu.

Dari perspektif tata kelola sektor publik, penguatan akuntabilitas pengelolaan dana konservasi juga sejalan dengan tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan negara. Meskipun secara normatif pengelolaan keuangan di sektor kehutanan dan konservasi telah diatur melalui berbagai regulasi dan sistem pelaporan yang baku, dalam praktik di tingkat Unit Pelaksana Teknis masih berpotensi terjadi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas administrasi, serta perbedaan pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme akuntabilitas tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik pengelolaan dana konservasi di tingkat lapangan.

Kompleksitas pengelolaan dana konservasi di TNLL semakin meningkat dengan adanya skema pendanaan dari berbagai sumber yang melibatkan *multi-stakeholder*. Salah satunya adalah program dana konservasi desa melalui Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) di Cluster Palolo, Napu, Lindu, dan Bada yang melibatkan *Forest Programme* III (FP III) Sulawesi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BPSKL), dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Program ini mengalokasikan dana untuk 40 desa yang berbatasan langsung dengan TNLL di 8 kecamatan pada 2 kabupaten (Sigi dan Poso) melalui mekanisme Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) (Ditjen KSDAE, 2020). Keberadaan *multiple funding sources* dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda menuntut sistem akuntabilitas yang *robust* untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana konservasi dari berbagai sumber tersebut.

Urgensi penguatan akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di TNLL semakin diperkuat dengan adanya inisiatif penilaian kesenjangan pendanaan yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui proyek *Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS)*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran riil pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna menghitung nilai kesenjangan dengan skenario minimal dan optimal, yang mencakup analisis kondisi keuangan *existing*, analisis kebutuhan pendanaan dan kesenjangan pendanaan, identifikasi peluang potensi bisnis untuk berkontribusi dalam sistem kawasan konservasi, dan penyusunan strategi pelaksanaan model bisnis (Ditjen KSDAE, 2020). Fakta bahwa diperlukan *assessment* khusus untuk menghitung kesenjangan pendanaan mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara kebutuhan operasional konservasi dengan dana yang tersedia, sekaligus menunjukkan pentingnya penelitian mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan dana yang ada saat ini untuk memastikan bahwa dana terbatas yang tersedia dikelola secara optimal.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana konservasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Ramadhan (2023) yang menganalisis efektivitas akuntabilitas di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dengan fokus pada keterbukaan pelaporan dan partisipasi masyarakat; Sari (2024) yang mengevaluasi mekanisme pengelolaan dana konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan penekanan pada penguatan pengawasan internal dan sistem pelaporan; serta Yuliana (2022) yang mengkaji pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan di unit pengelola taman nasional Kalimantan Timur. Namun, penelitian-

penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis konteks pengelolaan dana konservasi di kawasan dengan kompleksitas sosial-ekologis tinggi seperti TNLL Wilayah Napu yang memiliki karakteristik unik berupa *multiple funding sources*, tingginya konflik tenurial, serta keberagaman program kemitraan konservasi dengan masyarakat. Selain itu, belum ada penelitian yang mengintegrasikan analisis akuntabilitas dengan konteks kesenjangan pendanaan konservasi yang telah diidentifikasi melalui *assessment* Bappenas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola dana konservasi di lokasi dengan karakteristik serupa.

Mengingat kompleksitas pengelolaan dana konservasi di TNLL Wilayah Napu yang melibatkan *multiple stakeholders*, *multiple funding sources*, serta tantangan konservasi yang bersifat multidimensional, kajian mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan dana konservasi menjadi sangat krusial. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap mekanisme, praktik, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan konservasi dari berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi sehingga dapat dirumuskan strategi perbaikan yang aplikatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan sistem akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di BBTNLL Wilayah Napu khususnya dan kawasan konservasi dengan karakteristik serupa pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur akademis tentang tata kelola keuangan publik di sektor konservasi sumber daya alam, terutama dalam konteks kawasan dengan tekanan sosial-ekologis tinggi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan berharga bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyempurnakan kebijakan dan praktik pengelolaan dana konservasi di tingkat nasional, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola konservasi yang efektif, transparan, dan akuntabel demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. menurut Sugiyono (2022:9) Penelitian kualitatif memfokuskan pada penyelidikan objek yang alamiah, di mana Peneliti berperan penting dalam mengumpulkan data yang beragam (observasi dan wawancara) dengan tujuan memahami makna yang terkandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, khususnya mengenai mekanisme, praktik, dan kendala dalam akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:206) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada pengumpulan data berupa narasi atau deskripsi yang kaya dari para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana konservasi, sehingga dapat menangkap pengalaman, persepsi, serta dinamika yang terjadi secara natural tanpa ada manipulasi terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, metode ini mendukung peneliti dalam memahami berbagai proses yang berjalan dan hubungan antar aspek pengelolaan dana konservasi secara holistik dan kontekstual di lapangan. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai aktivitas pengelolaan dana, tata kelola, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas secara mendetail dan sistematis. Studi ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap aspek yang belum banyak diteliti secara empiris, terutama dalam konteks pengelolaan dana konservasi yang bersifat multidimensional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus sehingga data yang diperoleh dapat valid dan mencerminkan kenyataan di lapangan. Metode ini sangat sesuai untuk studi dengan tujuan menciptakan pemahaman menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan dana konservasi serta memperkuat teori yang ada berdasarkan observasi nyata di lingkungan kerja Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, khususnya Wilayah Napu di Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan september 2025 sampai maret 2026, dengan tahap pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil penelitian.

Teknik analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model Miles Dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Akuntabilitas Pengelolaan Dana Konservasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana konservasi di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu telah disusun dan dioperasionalkan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berlaku secara nasional, baik dari sisi sumber pendanaan maupun siklus pengelolaannya. Sumber dana konservasi berasal dari APBN (melalui DIPA) serta PNPB dari retribusi pengunjung, dan keduanya diperlakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan negara sehingga tunduk pada mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang baku. Secara normatif, kondisi ini selaras dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Mekanisme bahwa penggunaan dana hanya dapat dilakukan melalui dokumen anggaran yang sah dan prosedur pencairan resmi, disertai kewajiban dokumentasi dan pencatatan rinci, menunjukkan bahwa akuntabilitas diupayakan melalui pengendalian internal berbasis prosedur dan dokumen. Setiap transaksi keuangan ditopang oleh bukti formal, seperti surat perintah pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, daftar hadir, serta dokumentasi lapangan, yang kemudian dicatat dalam pembukuan resmi dan aplikasi keuangan pemerintah. Pola ini sejalan dengan literatur pengelolaan keuangan publik yang menempatkan sistem anggaran, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan (misalnya SPJ, laporan realisasi anggaran, dan laporan hasil audit) sebagai instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas keuangan sektor publik.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian tentang tata kelola pendanaan konservasi dan keuangan pemerintah yang menekankan pentingnya siklus anggaran yang lengkap dan terdokumentasi, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sebagai prasyarat akuntabilitas. Dalam konteks Lore Lindu, pengintegrasian PNPB dari retribusi pengunjung ke dalam sistem keuangan negara, dan penegasan peran petugas loket sebagai “garda terdepan” administrasi PNPB, mengindikasikan bahwa akuntabilitas dibangun secara berjenjang mulai dari titik penerimaan sampai tingkat pelaporan dan audit. Setiap level (loket, bendahara, sekretariat balai, hingga kementerian) memiliki peran dan kewajiban pertanggungjawaban yang spesifik, sesuai prinsip akuntabilitas berlapis (*multiple accountability*).

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian lain di konteks konservasi dan pengelolaan dana publik, pola ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang jelas, prosedur tertulis, dan sistem pelaporan terstandar dapat memperkuat akuntabilitas, selama diikuti oleh kepatuhan aktor dan dukungan kapasitas organisasi. Dalam sejumlah kajian tentang pengelolaan dana konservasi berbasis desa di sekitar Lore Lindu, misalnya, juga ditekankan bahwa penyaluran dana konservasi kepada Lembaga Pengelola Konservasi Desa tetap dibingkai dalam perjanjian kerja sama, rencana kerja tahunan, dan mekanisme pelaporan yang diawasi oleh Balai, sehingga aspek akuntabilitas tetap terjaga meskipun dana mengalir hingga ke tingkat komunitas. Hal ini memperlihatkan konsistensi antara praktik akuntabilitas di tingkat balai dengan pendekatan akuntabilitas pada skema pendanaan konservasi yang melibatkan masyarakat.

Secara keseluruhan, mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di Wilayah Napu dapat dipahami sebagai suatu sistem yang menggabungkan pengaturan kelembagaan (regulasi dan SOP), prosedur administratif (dokumen dan pelaporan), dan struktur pertanggungjawaban berjenjang yang menghubungkan titik penerimaan di lapangan dengan pelaporan ke tingkat kementerian.

Prinsip Pelaksanaan, Pencatatan, dan Pelaporan

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana konservasi di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan riil di lapangan, kondisi ekologi kawasan, serta rencana strategis pengelolaan Taman Nasional (Renstra dan rencana pengelolaan taman nasional, termasuk zonasi). Kegiatan dan program prioritas ditetapkan berdasarkan analisis ancaman dan kebutuhan, misalnya peningkatan patroli di wilayah rawan perambahan atau rehabilitasi di area yang mengalami kerusakan ekosistem. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya menghubungkan alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan konservasi, bukan sekadar mengikuti pola anggaran rutin.

Perencanaan yang berbasis dokumen formal (Renstra, DIPA, zonasi) memperkuat rasionalitas pengambilan keputusan anggaran dan mengurangi ruang diskresi yang tidak terkendali. Kewajiban melakukan revisi anggaran melalui mekanisme resmi ketika muncul kebutuhan mendesak menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan dana dibatasi secara prosedural. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas keuangan menuntut keseimbangan antara fleksibilitas manajerial (untuk merespons dinamika lapangan) dan kontrol fiskal (untuk mencegah penyimpangan), di mana setiap perubahan penggunaan dana harus dapat dilacak dan dijustifikasi.

Pada tahap pelaksanaan, setiap kegiatan didukung oleh dokumen perintah pelaksanaan yang jelas dan didampingi bukti transaksi yang lengkap. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang dilakukan tanpa otorisasi. Pada tahap pencatatan, seluruh transaksi keuangan kemudian dicatat ke dalam Buku Kas Umum dan aplikasi keuangan pemerintah, dengan klasifikasi berdasarkan kode akun dan jenis belanja, sehingga memudahkan pelacakan dan penyusunan laporan.

Pada tahap pelaporan, laporan realisasi anggaran disusun secara berkala (bulanan dan triwulanan) dan diverifikasi berjenjang sebelum disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Keteraturan jadwal pelaporan, disertai verifikasi berlapis, menunjukkan adanya siklus akuntabilitas prosedural yang relatif lengkap. Hal ini sejalan dengan praktik tata kelola keuangan publik yang baik, di mana setiap transaksi harus memenuhi empat unsur: otorisasi, dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan.

Di tingkat loket, pencatatan harian, rekonsiliasi akhir hari, dan penyetoran disertai bukti setor resmi menunjukkan bahwa prinsip yang sama juga diterapkan pada titik penerimaan dana. Meskipun sistem yang digunakan masih manual, pola kerja tersebut sudah memenuhi unsur dasar akuntabilitas, yaitu pencatatan (*recording*), verifikasi (*rechecking*), dan pelaporan (*reporting*). Tantangan yang muncul adalah meningkatnya risiko kesalahan perhitungan atau keterlambatan ketika volume transaksi tinggi dan kondisi lapangan tidak kondusif, yang menegaskan perlunya modernisasi sistem pencatatan di titik penerimaan agar setara dengan sistem digital di tingkat bendahara dan manajemen.

Jika dibandingkan dengan literatur administrasi publik, pola perencanaan dan pelaporan yang ditemukan di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu relatif konsisten dengan prinsip “*result-based budgeting*” dan “*performance accountability*”, di mana alokasi anggaran dikaitkan dengan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan harus dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah.

Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu dapat dibaca dari dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, penggunaan aplikasi keuangan pemerintah, verifikasi berlapis sebelum pencairan, dan audit rutin menjadi tiga pilar utama akuntabilitas prosedural. Aplikasi keuangan terintegrasi memfasilitasi pencatatan transaksi secara sistematis dan memudahkan penelusuran ketika dilakukan pemeriksaan. Verifikasi berlapis memastikan bahwa kesalahan atau ketidakwajaran dapat disaring sejak dini, sementara audit berkala dari Inspektorat dan BPK berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan koreksi dari luar unit kerja.

Secara eksternal, transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan kepada kementerian melalui sistem pelaporan nasional dan penyajian informasi kegiatan konservasi kepada publik melalui berbagai media resmi, termasuk laporan tahunan dan kanal informasi publik. Namun, akses publik terhadap rincian anggaran masih dibatasi ketentuan regulasi, sehingga transparansi yang

terbangun lebih dominan bersifat vertikal (ke atas dan ke lembaga pengawas) dibanding horizontal (ke masyarakat luas). Kondisi ini sejalan dengan temuan banyak studi di sektor publik Indonesia yang menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah pusat dan lembaga audit) sering kali lebih kuat dibanding akuntabilitas horizontal kepada warga.

Kepatuhan terhadap regulasi dan SOP tergambar dari ketaatan pada aturan keuangan negara, peraturan PNPB, serta pelaksanaan SOP internal dari tahap pengajuan anggaran sampai pengarsipan dokumen. Penekanan pada kelengkapan dokumen sebagai prasyarat pemrosesan laporan dan potensi sanksi administratif saat terjadi pelanggaran SOP menunjukkan bahwa aspek legal *accountability* cukup diperhatikan. Pola ini sejalan dengan pendekatan hukum-administratif yang lazim dan, di satu sisi, efektif untuk membangun budaya patuh prosedur, meskipun di sisi lain berisiko mendorong fokus berlebihan pada kepatuhan formal (*rule compliance*) ketimbang outcome substansial jika tidak diimbangi dengan orientasi kinerja.

Dalam beberapa penelitian tentang pengelolaan konservasi dan keuangan publik, ditegaskan bahwa keberadaan regulasi dan SOP yang lengkap merupakan prasyarat penting, tetapi bukan kondisi yang cukup. Akuntabilitas yang substantif baru terwujud apabila regulasi tersebut dijalankan dengan integritas dan disertai kapasitas teknis yang memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Lore Lindu, unsur regulatif dan prosedural sudah relatif kuat, tetapi masih menghadapi tantangan kapasitas SDM dan infrastruktur, yang sejalan dengan pola umum di banyak unit kerja konservasi dan sektor publik lainnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas

Faktor pendukung akuntabilitas yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi utama. Pertama, keberadaan regulasi dan SOP yang jelas di tingkat Balai, yang menjadi rujukan formal dalam seluruh proses pengelolaan dana. Kedua, penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan sistem kementerian, yang membantu menertibkan administrasi, pencatatan, dan pelaporan, serta memungkinkan penelusuran transaksi secara lebih mudah. Ketiga, kesadaran individu, terutama petugas loket, mengenai bahwa dana retribusi yang mereka kelola merupakan bagian dari pendanaan kegiatan konservasi dan menuntut tanggung jawab moral dalam pencatatan dan penyeteroran. Tiga dimensi ini berkelindan membentuk sistem akuntabilitas yang tidak hanya bertumpu pada aturan, tetapi juga pada sistem dan nilai.

Faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM administrasi dan keuangan, tingginya beban kerja administrasi yang tidak sebanding dengan jumlah personel, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, serta sistem pencatatan manual di loket. Hambatan ini sejalan dengan temuan banyak penelitian di sektor publik dan konservasi, yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas seringkali terhambat oleh masalah kapasitas kelembagaan dan infrastruktur, bukan oleh ketiadaan regulasi.

Keterbatasan jaringan internet dan ketergantungan pada pencatatan manual di loket juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain sistem (yang mengasumsikan dukungan infrastruktur teknologi memadai) dan realitas lapangan di kawasan terpencil. Dalam literatur kebijakan publik, hal ini terkait dengan isu kesesuaian konteks (*contextual fit*), di mana kebijakan dan sistem nasional perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah agar implementasinya efektif. Dalam konteks Lore Lindu, hal ini berarti bahwa penguatan akuntabilitas tidak dapat hanya bertumpu pada pengembangan aplikasi di tingkat pusat, tetapi juga harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan solusi teknis yang sesuai dengan karakteristik geografis dan keterjangkauan teknologi di lapangan.

Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Tata Kelola Dana Konservasi

Upaya perbaikan yang telah dilakukan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu, seperti penguatan monitoring internal, penegakan disiplin administrasi, peningkatan pengawasan dokumen, pelatihan, dan rencana digitalisasi pelaporan, menunjukkan adanya komitmen untuk bergerak dari sekadar kepatuhan formal ke arah penguatan sistem akuntabilitas yang lebih matang. Rencana penambahan SDM administrasi dan penguatan transparansi publik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang mendorong peningkatan kapasitas organisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Rekomendasi penerapan sistem pencatatan berbasis digital (*e-ticketing*) di loket, integrasi sistem antara loket dan bagian keuangan, serta pelatihan tambahan bagi petugas loket mengenai prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan, sangat relevan dengan kebutuhan penguatan kapasitas di tingkat front line. Digitalisasi penerimaan PNPB telah lama dipromosikan dalam berbagai studi dan kebijakan pengelolaan keuangan negara sebagai cara efektif untuk mengurangi risiko kebocoran, meningkatkan akurasi data, mempercepat rekonsiliasi, dan memperluas transparansi.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana konservasi merupakan fungsi dari kombinasi tiga unsur: desain kelembagaan (regulasi, SOP, struktur organisasi), kapasitas teknis (sistem informasi keuangan, digitalisasi, infrastruktur), dan integritas serta kesadaran aktor (pimpinan, bendahara, petugas lapangan). Penguatan hanya pada salah satu unsur tanpa diikuti unsur lainnya cenderung menghasilkan akuntabilitas yang timpang: misalnya, regulasi kuat tetapi kapasitas rendah atau sistem canggih tetapi integritas lemah.

Jika dikaitkan dengan penelitian lain di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Lore Lindu, tampak bahwa akuntabilitas pendanaan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program. Di tingkat desa, misalnya, pengelolaan dana konservasi desa dan lembaga pengelola konservasi desa menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan dan dapat diawasi, agar dukungan dana benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan konservasi. Temuan penelitian ini pada tingkat balai memperlihatkan bahwa prinsip yang sama berlaku di tingkat kelembagaan yang lebih tinggi: keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran, tetapi juga oleh mutu tata kelola keuangan, partisipasi dan pemahaman masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas yang terjaga di setiap rantai pengelolaan dana.

Dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam situasi SDM terbatas, wilayah kerja yang luas, dan infrastruktur teknologi yang belum merata, serta bagaimana menjembatani kesenjangan antara akuntabilitas vertikal kepada pemerintah pusat dan lembaga audit dengan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sekitar kawasan.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu telah dibangun melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang mengikuti sistem keuangan negara untuk dana APBN dan PNBP. Mekanisme ini ditopang regulasi dan SOP yang jelas, dokumentasi transaksi yang lengkap, serta struktur pertanggungjawaban berjenjang dari loket, bendahara, hingga manajemen balai.
2. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui transparansi internal (penggunaan aplikasi keuangan, verifikasi berlapis, dan audit rutin), kepatuhan pada regulasi dan SOP, serta keterkaitan penggunaan dana dengan tujuan konservasi. Transparansi eksternal sudah mulai diwujudkan melalui pelaporan kepada kementerian dan penyampaian informasi program kepada masyarakat, meskipun keterbukaan rincian anggaran kepada publik masih terbatas oleh ketentuan peraturan.
3. Faktor pendukung akuntabilitas meliputi adanya kerangka regulasi dan SOP yang jelas, penggunaan sistem keuangan terintegrasi, serta kesadaran dan komitmen individu (pimpinan, bendahara, petugas loket) terhadap pentingnya dana konservasi. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM administrasi dan keuangan, tingginya beban kerja, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, dan masih digunakannya sistem pencatatan manual di loket sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan pencatatan.
4. Upaya perbaikan yang dapat direkomendasikan mencakup penguatan monitoring dan pengawasan internal, digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan (termasuk *e-ticketing* di loket yang terintegrasi dengan bagian keuangan), peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, penambahan tenaga administrasi, serta peningkatan transparansi informasi penggunaan dana kepada masyarakat sekitar kawasan. Penguatan serempak pada aspek kelembagaan, sistem, dan integritas pelaksana dipandang sebagai kunci peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana konservasi di Wilayah Napu.

SARAN

Disarankan agar Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Wilayah Napu memperkuat kapasitas SDM keuangan melalui pelatihan rutin dan penataan beban kerja, mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan digital (termasuk *e-ticketing* di loket) yang terintegrasi dengan bagian keuangan, serta meningkatkan monitoring internal yang tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan konservasi. Selain itu, balai disarankan untuk memperjelas dan memperluas transparansi kepada masyarakat sekitar melalui penyajian informasi ringkas dan mudah dipahami tentang sumber, penggunaan, dan manfaat dana konservasi, serta mulai mengembangkan pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam forum evaluasi atau konsultasi terkait pengelolaan dana konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bovarnick, A., Fernandez, L., Galindo, J., & Negret, H. (2010). *Financial sustainability of protected areas in Latin America and the Caribbean*. New York: United Nations Development Programme (UNDP).
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman.
- Harrison, J. S., Freeman, R. E., & Abreu, M. C. S. (2015). *Stakeholder theory as an ethical approach to effective management*. *Business Ethics Quarterly*, 25(1), 97–124. <https://doi.org/10.1017/beq.2014.47>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Ismayati, E., dkk. (2025). *Akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meningkatkan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang*. *Jurnal Administrasi Publik*, xx(x), xx–xx.
- IUCN. (2020). *Financing protected and conserved areas: A guide for practitioners*. Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Pedoman pengelolaan dana konservasi kawasan*. Jakarta: KLHK.
- Koppell, J. G. S. (2010). *World rule: Accountability, legitimacy, and the design of global governance*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- MacKinnon, J., MacKinnon, K., Child, G., & Thorsell, J. (1993). *Managing protected areas in the tropics*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2015). *Public governance principles*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2020). *Public integrity handbook*. Paris: OECD Publishing.
- Rahman, M. A., dkk. (2023). *Peran stakeholder dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah*. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, xx(x), xx–xx.
- Ramadhan. (2023). *Efektivitas akuntabilitas dalam pengelolaan dana alokasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan*. *Jurnal Akuntansi Publik*, xx(x), xx–xx.
- Sari. (2024). *Evaluasi pengelolaan dana konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, xx(x), xx–xx.
- Schillemans, T. (2016). *Calibrating public sector accountability: Translating experimental findings to public sector accountability*. *Public Management Review*, 18(9), 1400–1420. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1112423>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Van Slyke, D. M. (2007). *Agents or stewards: Using theory to understand the government–nonprofit social service contracting relationship*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul012>
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliana. (2022). *Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pada unit pengelola taman nasional di Kalimantan Timur*. *Skripsi*. Universitas xx.